

ETIKA SOSIAL DAN KEADILAN DALAM TEOLOGI KONTEMPORER

Elizama Gulo¹, Annah Gustharina Saripurta², Ira Maya Pasaribu³, Pesta Sinaga⁴
elizamagulo.glowfc@gmail.com¹, annahnusantara@gmail.com², mayajosarama22@gmail.com³,
pestas49@gmail.com⁴

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji secara mendalam tentang etika sosial dan keadilan dalam perspektif teologi kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana berbagai arus teologi kontemporer, seperti teologi pembebasan, teologi feminis, teologi ekumenis, dan teologi kontekstual Indonesia, merumuskan konsep keadilan sosial dan mendorong gereja untuk terlibat aktif dalam transformasi masyarakat. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis hermeneutik teologis, jurnal ini menemukan bahwa teologi kontemporer secara konsisten menekankan bahwa keadilan bukan sekadar nilai etis abstrak, melainkan merupakan ekspresi kongkret dari kasih Allah yang harus diwujudkan dalam realitas sosial politik. Para teolog seperti Gustavo Gutierrez, Jurgen Moltmann, Miroslav Volf, dan Nicholas Wolterstorff telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kerangka etika sosial berbasis teologis yang relevan untuk konteks masa kini. Implikasi praktis kajian ini menuntut gereja untuk menjadi komunitas profetis yang memperjuangkan keadilan struktural, membela kaum marginal, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang bermartabat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, gereja dipanggil untuk menjadi agen rekonsiliasi dan keadilan yang melampaui batas-batas denominasi dan agama.

Kata Kunci: Etika Sosial, Keadilan, Teologi Kontemporer.

ABSTRACT

This journal provides an in-depth examination of social ethics and justice from the perspective of contemporary theology. The study aims to analyze how various currents of contemporary theology, such as liberation theology, feminist theology, ecumenical theology, and Indonesian contextual theology, formulate concepts of social justice and encourage the church to engage actively in societal transformation. Employing a literature review and theological-hermeneutic analysis, the study finds that contemporary theology consistently emphasizes that justice is not merely an abstract ethical value but a concrete expression of God's love that must be realized within socio-political realities. Theologians such as Gustavo Gutiérrez, Jürgen Moltmann, Miroslav Volf, and Nicholas Wolterstorff have made significant contributions to constructing a theologically grounded framework for social ethics that is relevant to the contemporary context. The practical implications of this study call upon the church to serve as a prophetic community that champions structural justice, advocates for the marginalized, and participates in building a society characterized by dignity. Within Indonesia's pluralistic context, the church is called to act as an agent of reconciliation and justice that transcends denominational and religious boundaries.

Keywords: Social Ethics, Justice, Contemporary Theology.

PENDAHULUAN

Persoalan keadilan sosial telah menjadi salah satu tema sentral dalam wacana teologi kontemporer. Sejak pertengahan abad ke-20, para teolog dari berbagai penjuru dunia terutama dari Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa mulai mempertanyakan kembali relevansi iman Kristen di tengah realitas kemiskinan, penindasan, ketidaksetaraan, dan berbagai bentuk ketidakadilan struktural. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah, apakah Injil hanya berbicara tentang keselamatan jiwa secara individual, ataukah ia juga menyentuh dimensi sosial politik kehidupan manusia ?

Dalam konteks Indonesia, persoalan keadilan sosial memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sebagai negara dengan beragam suku, budaya, agama, dan kelas sosial, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warganya. Gereja-gereja di Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap realitas ini. Justru, kehadiran gereja di tengah masyarakat majemuk Indonesia menjadi kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk menjadi saksi keadilan Allah yang konkret (Aritonang & Steenbrink, 2008).

Teologi kontemporer telah memberikan jawaban yang tegas bahwa iman yang sejati tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Konsep kerajaan Allah (Kingdom of God) yang diajarkan Yesus tidak hanya merujuk pada realitas eskatologis di masa mendatang, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang harus diwujudkan saat ini atau sekarang (Moltmann, 2000). Gereja, sebagai tubuh Kristus di dunia, dipanggil untuk menjadi komunitas yang mempraktikkan keadilan, bukan hanya mengkhobatkannya.

Pada era globalisasi dan perkembangan ilmu teknologi masa ini, teologi kontemporer terus mengalami perkembangan. Teologis kontemporer secara perkembangan metodologi kontekstual dan inklusif untuk menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh modernitas. Teologi kontekstual Hasan Hanafi, misalnya, menggarisbawahi perlunya pemahaman agama yang transformatif dan inklusif yang menghormati pluralisme dan menumbuhkan toleransi (Deswita & Azizah Gazali, 2022). Teologi saat ini tidak bisa terlaku kaku, sebab akan menimbulkan kesan “menghakimi” bagi agama lain. Itu bukan berarti harus pluraris, melainkan lebih kepada etika sosial yang menghormati keyakinanlain yang berbeda. Teologi kontemporer berfungsi sebagai dialog yang luas dan terus berkembang, yang berfokus pada harapan dan masalah-masalah manusia dalam konteks modernitas akhir (Frizzell, 2020). Yang mengedepankan dialog untuk mencari solusi bersama, dengan nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Pendekatan ini dicerminkan dalam teologi Kristen, yang juga berusaha untuk terlibat dengan isu-isu kontemporer dengan meninjau kembali doktrin-doktrin tradisional dan menerapkannya pada konteks modern (Plantinga et al., 2019). Sehingga melalui pendekatan ini Kekristenan bisa mengkontekstualisasikan Injil dalam budaya modern.

Saat ini kekristenan dihadapkan dengan pluralisme agama, dimana ini menjadi tantangan yang serius karena memudahkan inti dari ajaran Kristen. Pluralisme agama sering mengarah pada relativisme teologis, di mana validitas klaim kebenaran agama menjadi tergantung pada perspektif individu. Relativisme ini menantang komitmen terhadap satu tradisi agama, karena menjadi sulit untuk memperdebatkan superioritas atau eksklusivitas satu tradisi atas tradisi lain (Cornille, 2023). Relativisme membuat nilai-nilai penting dalam agama menjadi abu-abu, oleh karena itu perlu upaya integrasi agar tidak terjebak dalam perangkapnya. Peran nilai-nilai tradisional dalam memoderasi hubungan antaragama menyoroti pentingnya mengintegrasikan kerangka budaya adat ke dalam wacana teologi kontemporer (Owusu-Ansah & Akyeampong, 2019), namun harus tetap ada batasannya agar tidak terjerumus dalam pluralisme agama.

Wacana mengenai etika sosial dan keadilan selalu menempati posisi sentral dalam perkembangan teologi kontemporer. Di Indonesia, tantangan sosio-ekonomi, marginalisasi, dan ketimpangan struktural menuntut teologi tidak hanya berhenti pada wilayah doktrinal atau metafisika abstrak. Teologi kontemporer dipanggil untuk memberikan jawaban konkret terhadap penderitaan manusia. Melalui pendekatan kontekstual dan pembebasan, para teolog dan akademisi di Indonesia mulai merekonstruksi pemikiran keagamaan agar lebih responsif terhadap realitas sosial. Tulisan ini juga akan mengeksplorasi etika sosial dan keadilan teologis kontemporer dengan menyintesis pemikiran dari empat jurnal ilmiah di

Indonesia, yang secara khusus menyoroti teologi pembebasan, teologi disabilitas, etika ruang publik, dan tanggung jawab sosial gereja maupun institusi agama dalam mewujudkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis dinamika etika sosial dan keadilan dalam teologi kontemporer. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana fondasi teologis etika sosial dalam tradisi Kristen, konsep keadilan dalam berbagai aliran teologi kontemporer, kontribusi teologi pembebasan dan teologi ekumenis terhadap wacana etika sosial, relevansinya dalam konteks Indonesia, serta implikasi praktis bagi kehidupan bergereja masa kini. Studi pustaka (*library research*) digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data berupa literatur ilmiah, buku teologi, artikel jurnal, dan dokumen terkait yang berfokus pada etika sosial dan keadilan dalam teologi kontemporer. Dalam proses pengolahan datanya penulis tidak boleh mengubah, menambah, atau memanipulasi objek atau bidang penelitian. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait hasil tujuan penelitian, dari analisis ini akan dikaitkan dengan teori-teori teologi kontemporer dan etika sosial untuk membangun kerangka pemikiran yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keadilan dalam Kitab Suci

Fondasi etika sosial dalam teologi Kristen berakar kuat dalam tradisi Alkitab. Dalam tradisi Perjanjian Lama, kata Ibrani “*mishpat*” (keadilan) dan “*tsedeqah*” (kebenaran/keadilan) muncul berulang kali sebagai tuntutan sentral Allah terhadap umatNya (Wolterstorff, 2008). Para nabi seperti Amos, Mikha, dan Yesaya dengan lantang mengecam ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat Israel. Amos 5:24 menyerukan agar keadilan mengalir seperti air yang tidak pernah kering, merupakan sebuah metafora yang menggambarkan keadilan sebagai kebutuhan dasar kehidupan.

Dalam tradisi Perjanjian Baru, Yesus sendiri memperlihatkan kepedulian mendalam terhadap mereka yang terpinggirkan. Program pelayananNya, sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 4:18-19, secara eksplisit mencakup pemberitaan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi tawanan, pemulihan penglihatan bagi orang buta, dan kebebasan bagi yang tertindas. Perumpamaan-perumpamaan Yesus, seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati dan pengadilan terakhir dalam Matius 25, menekankan bahwa cinta kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari cinta kasih dan keadilan terhadap sesama (Hauerwas & Wells, 2011).

Surat-surat Paulus juga memberikan dimensi penting dalam etika sosial Kristen. Konsep “*koinonia*” (persekutuan) yang dikembangkan Paulus tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdimensi sosial ekonomi. Dalam 2 Korintus 8-9, Paulus mendorong jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan dana bagi jemaat-jemaat yang kekurangan, sebagai ekspresi nyata dari solidaritas Kristen lintas batas. Hal ini menunjukkan bahwa etika sosial bukan tambahan dari teologi, melainkan merupakan inti dari iman Kristen itu sendiri (Verhey, 1984).

Lebih jauh, hukum Taurat memuat sejumlah ketentuan yang secara eksplisit melindungi kaum lemah dan mencegah akumulasi ketidakadilan. Hukum tahun Sabat dan tahun Yobel (Imamat 25) memerintahkan pembebasan hamba, penghapusan utang, dan pengembalian tanah kepada pemilik asalnya secara berkala, sebuah mekanisme teologis

untuk mencegah kesenjangan struktural menjadi permanen. Ketentuan tentang menyisakan hasil panen bagi orang miskin dan orang asing (Imamat 19:9-10; Ulangan 24:19-22) menegaskan bahwa hak kaum papa atas sumber daya bukanlah belas kasihan, melainkan tuntutan keadilan yang melekat. Dalam kerangka Wolterstorff, ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa keadilan primer dalam Alkitab berakar pada pengakuan atas hak yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia sebagai citra-Nya (Wolterstorff, 2008). Para nabi kemudian mengangkat prinsip ini menjadi kritik sosial yang tajam terhadap penguasa yang menindas, sehingga keadilan menjadi ukuran keotentikan ibadah itu sendiri.

b. Perkembangan Etika Sosial dalam Tradisi Teologi

Sepanjang sejarah, gereja Kristen telah bergulat dengan pertanyaan tentang hubungan antara iman dan masyarakat. Agustinus dari Hippo, dalam karyanya “*De Civitate Dei*”, membedakan antara “kota Allah” dan “kota dunia”, namun tidak memisahkan keduanya secara radikal. Bagi Agustinus, orang Kristen hidup dalam tegangan antara dua kota tersebut dan dipanggil untuk memberi kontribusi bagi kebaikan bersama (*common good*) dalam tatanan dunia (Niebuhr, 1932).

Pada era Reformasi, Martin Luther mengembangkan doktrin “dua Kerajaan” yang membedakan, namun tidak memisahkan peran gereja dan negara dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Yohanes Calvin dengan doktrin teokrasinya mendorong transformasi seluruh aspek kehidupan masyarakat berdasarkan Firman Allah. Tradisi Reformed Calvin inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi bagi perkembangan etika sosial Protestan di abad-abad berikutnya (de Gruchy, 1995).

Pada abad ke-20, Reinhold Niebuhr memberikan sumbangsih penting dengan mengembangkan “realisme Kristen”. Niebuhr menolak utopianisme naif yang mengira bahwa manusia dapat membangun masyarakat sempurna di bumi, sambil tetap menekankan bahwa keadilan relatif harus terus diperjuangkan di tengah realitas dosa yang mengakar dalam struktur-struktur sosial. Baginya, cinta dan keadilan berada dalam dialektika yang terus-menerus, cinta mendorong kita melampaui keadilan, namun keadilan tetap menjadi standar minimum yang harus dipenuhi dalam kehidupan sosial (Niebuhr, 1932).

Memasuki abad ke-20, refleksi etika sosial Kristen semakin melembaga dan melintasi batas denominasi. Gerakan Injil Sosial (*Social Gospel*) yang dipelopori Walter Rauschenbusch menantang gereja untuk tidak membatasi keselamatan pada dimensi individual, melainkan menuntut pembaruan struktur-struktur sosial yang menindas. Pada saat yang sama, tradisi ekumenis dan Reformed terus mengembangkan pemikiran tentang relasi gereja, negara, dan masyarakat sipil (de Gruchy, 1995). Lochman mengingatkan bahwa arus-arus ini tidak boleh dipertentangkan secara dikotomis: rekonsiliasi dan pembebasan merupakan dua sisi dari satu misi Allah yang utuh, sehingga gereja dipanggil memegang keduanya secara seimbang tanpa mengorbankan yang satu demi yang lain (Lochman, 1980). Warisan inilah yang kemudian mengalir ke dalam teologi-teologi kontekstual paruh kedua abad ke-20, termasuk teologi pembebasan Amerika Latin.

c. Keadilan Dalam Perspektif Teologi Kontemporer

a) Teologi Pembebasan : Preferential Option for the Poor

Teologi pembebasan yang lahir di Amerika Latin pada akhir 1960-an merupakan salah satu gerakan teologis paling berpengaruh dalam abad ke-20. Gustavo Gutierrez, seorang teolog Peru yang sering disebut sebagai “Bapak Teologi Pembebasan”, dalam karyanya yang monumental “*A Theology of Liberation*” (1973) berargumen bahwa gereja dipanggil untuk membuat “pilihan preferensial bagi orang miskin” (*preferential option for the poor*). Ini bukan berarti gereja hanya peduli pada orang miskin secara eksklusif, melainkan bahwa keadilan Allah menuntut kita melihat realitas sosial dari perspektif mereka yang paling rentan (Gutierrez, 1973).

Metode teologi pembebasan yang khas adalah lingkaran hermeneutik, dimulai dari keterlibatan dalam realitas sosial (lihat), dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap penyebab kemiskinan dan ketidakadilan (analisis), kemudian menafsirkan ulang Alkitab dari perspektif orang miskin (refleksi teologis), dan akhirnya bergerak menuju tindakan transformatif (aksi). Praxis gabungan antara refleksi dan tindakan yang menjadi metode teologis yang sentral dalam teologi pembebasan (Boff & Boff, 2007).

Salah satu ekspresi paling konkret dari teologi pembebasan adalah komunitas basis gerejawi (*basic ecclesial communities*), yakni kelompok-kelompok kecil umat miskin yang membaca Alkitab sambil merefleksikan pergumulan sosial mereka dan merumuskan aksi bersama. Melalui komunitas semacam ini, teologi berhenti menjadi monopoli kaum terpelajar dan menjadi milik umat yang tertindas (Boff & Boff, 2007). Meski demikian, teologi pembebasan tidak lepas dari kritik, terutama tuduhan bahwa ia terlalu bergantung pada analisis sosial bercorak Marxis. Para pembelanya menjawab bahwa penggunaan analisis sosial bersifat instrumental untuk memahami mekanisme kemiskinan, bukan penerimaan ideologi secara utuh, dan bahwa inti gerakan ini tetaplah iman akan Allah yang berpihak kepada kehidupan.

Jon Sobrino, teolog Jesuit dari El Salvador, mengembangkan lebih lanjut kristologi dari perspektif orang miskin. Dalam karyanya tentang Yesus sang Pembebas, Sobrino berargumen bahwa Yesus yang historis berpihak kepada orang-orang yang dipinggirkan oleh sistem agama dan sosial pada zamannya. Salib Kristus, menurutnya, merupakan akibat dari keterlibatannya dalam konflik sosial politik, bukan semata-mata penggenapan rencana penyelamatan yang bersifat transaksional (Sobrino, 2008).

b) Teologi Moltmann : Teologi Harapan dan Solidaritas

Jurgen Moltmann, teolog Jerman yang paling berpengaruh di paruh kedua abad ke-20, memberikan kerangka eskatologis yang kuat bagi etika sosial Kristen. Dalam “*Theology of Hope*” (1967), Moltmann berargumen bahwa harapan Kristen bukan pelarian dari dunia, melainkan daya transformatif yang mendorong keterlibatan aktif dalam mengubah realitas sosial menuju visi Kerajaan Allah. Harapan eskatologis, bagi Moltmann, adalah basis motivasi bagi perjuangan keadilan di masa kini (Moltmann, 1967).

Dalam “*The Crucified God*” (1974), Moltmann mengembangkan teologi salib yang mendalam. Allah yang terlibat dalam penderitaan manusia melalui salib Kristus adalah Allah yang berpihak kepada mereka yang menderita. Teologi patipassian Moltmann, menegaskan bahwa Allah Bapa pun merasakan penderitaan dan menjadi basis teologis bagi solidaritas dengan mereka yang tertindas. Gereja yang mengikut Kristus yang tersalib dipanggil untuk hadir di tengah penderitaan dan memperjuangkan pembebasan (Moltmann, 1974).

Kontribusi lain Moltmann adalah dalam bidang teologi pneumatologi sosial. Dalam “*The Spirit of Life*” (1992), ia mengembangkan pemahaman tentang Roh Kudus sebagai Roh kehidupan yang bekerja dalam seluruh ciptaan, mendorong pemulihan dan pembebasan. Hal ini memperluas dimensi etika sosial Kristen tidak hanya dalam konteks antarmanusia, tetapi juga mencakup dimensi ekologis dan kosmis (Moltmann, 1992).

Ketiga karya besar Moltmann ini membentuk satu kesatuan yang koheren: harapan eskatologis dalam *Theology of Hope* memberi arah, salib dalam *The Crucified God* memberi solidaritas dengan yang menderita, dan Roh Kudus dalam *The Spirit of Life* memberi daya pembaruan. Konsekuensinya bagi etika sosial adalah bahwa iman Kristen tidak pernah netral terhadap sejarah. Gereja yang hidup dalam terang Kerajaan Allah yang akan datang justru terdorong untuk mengkritik keadaan sekarang yang belum adil dan bekerja mengubahnya. Dengan demikian, harapan bukanlah candu yang membius,

melainkan sumber keresahan kudus yang menolak menerima ketidakadilan sebagai takdir (Moltmann, 1967).

c) Miroslav Volf : Rekonsiliasi dan Embrace

Miroslav Volf, teolog Kroasia yang banyak berkarya di Amerika Serikat, memberikan sumbangan unik dalam wacana etika sosial melalui teologi rekonsiliasi dan “embrace” (pelukan). Dalam “Exclusion and Embrace” (1996), Volf mengkaji dinamika pengucilan dan penerimaan dalam konteks konflik etnis dan sosial. Ia berargumen bahwa rekonsiliasi sejati tidak dapat terjadi tanpa pengakuan atas ketidakadilan yang telah dilakukan, namun pada saat yang sama harus melampaui sekadar tuntutan keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang diinspirasi oleh kasih Allah (Volf, 1996).

Konsep “will to embrace” (kehendak untuk merangkul) yang dikembangkan Volf menjadi alternatif teologis terhadap logika balas dendam dan perang budaya. Ia menekankan bahwa identitas Kristen yang dibentuk oleh Injil harus mampu membuka diri terhadap yang “lain” (the Other), termasuk musuh dan pelaku ketidakadilan dalam spirit pengampunan dan transformasi. Namun, Volf juga menegaskan bahwa embrace tidak berarti menerima ketidakadilan, melainkan membangun relasi baru yang didasarkan pada kebenaran dan pengampunan (Volf, 1996).

Kontribusi Volf menjadi sangat relevan bagi masyarakat yang pernah terluka oleh konflik. Ia menolak dua jalan buntu sekaligus: melupakan ketidakadilan demi kedamaian semu, dan mengabadikan dendam atas nama keadilan. Jalan ketiga yang ia tawarkan adalah ingatan yang menyembuhkan, yaitu mengingat kejahatan secara jujur namun dalam kerangka harapan akan pemulihan. Bagi gereja, ini berarti menjadi ruang di mana korban dapat menyuarakan lukanya dan pelaku dapat menempuh pertobatan, sehingga rekonsiliasi tidak menjadi pemakluman atas ketidakadilan, melainkan penciptaan relasi baru yang berpijak pada kebenaran (Volf, 1996).

d) Nicholas Wolterstorff : Keadilan sebagai Hak

Nicholas Wolterstorff, filsuf teolog Reformed Belanda Amerika, mengembangkan pemikiran mendalam tentang keadilan dalam karyanya “Justice : Rights and Wrongs” (2008). Wolterstorff berargumen bahwa keadilan dalam perspektif Alkitab bukan hanya soal prosedur atau kontrak sosial, melainkan berbasis pada hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai citra Allah (Imago Dei). Pelanggaran hak seseorang adalah penghinaan terhadap Allah yang telah menganugerahkan martabat tersebut (Wolterstorff, 2008).

Wolterstorff membedakan antara “rectifying justice” (keadilan korektif atau restoratif) dan “primary justice” (keadilan primer). Keadilan primer adalah tentang bagaimana relasi-relasi sosial seharusnya terstruktur agar setiap orang mendapatkan haknya, sementara keadilan korektif berkaitan dengan upaya memulihkan situasi ketika keadilan primer telah dilanggar. Bagi Wolterstorff, gereja dipanggil untuk memperjuangkan keduanya untuk membangun tatanan yang adil sekaligus memulihkan mereka yang telah diperlakukan tidak adil (Wolterstorff, 2008).

DIMENSI EKUMENIS ETIKA SOSIAL

a. Kontribusi Dewan Gereja-Gereja Sedunia

Dewan Gereja-Gereja Sedunia (World Council of Churches/WCC) telah memainkan peran penting dalam mengembangkan etika sosial Kristen yang bersifat ekumenis. Sejak pembentukannya pada 1948, WCC secara konsisten menyuarakan keprihatinan tentang isu-isu keadilan global, meliputi perlucutan senjata, pengentasan kemiskinan, hak asasi manusia, dan rekonsiliasi antarbangsa (WCC, 2013). Program “Justice, Peace and Integrity of Creation” (JPIC) yang diluncurkan WCC pada 1983 menjadi salah satu inisiatif ekumenis paling signifikan dalam abad ke-20.

Teologi ekumenis yang dikembangkan WCC menekankan bahwa perpecahan gereja merupakan penghalang bagi kesaksian gereja di dunia. Ketika gereja terpecah-pecah karena kepentingan denominasi atau etnis, gereja kehilangan kredibilitasnya sebagai komunitas yang memperjuangkan rekonsiliasi dan keadilan. Sebaliknya, persatuan gereja yang nyata dalam perbedaan merupakan tanda eskatologis tentang Kerajaan Allah yang akan datang (Bevans & Schroeder, 2011).

b. Teologi Feminis dan Keadilan Gender

Teologi feminis telah memberikan kritik tajam terhadap tradisi teologis yang sering kali mereproduksi struktur patriarkal dan ketidakadilan gender. Elisabeth Schüssler Fiorenza, dalam karyanya *"In Memory of Her"* (1983), merekonstruksi sejarah awal Kekristenan untuk menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam gerakan Yesus dan gereja perdana. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menantang legitimasi teologis dari struktur patriarkal yang kemudian mendominasi gereja (Fiorenza, 1983).

Teolog feminis seperti Letty Russell mengembangkan konsep *"partnership"* (kemitraan) sebagai model relasi yang seharusnya ada dalam gereja dan masyarakat. Kemitraan ini menolak hirarki kekuasaan yang menindas dan menegaskan kesetaraan martabat semua manusia baik laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Dalam *"Household of Freedom"* (1987), Russell berargumen bahwa Kerajaan Allah adalah komunitas di mana tidak ada lagi pemisahan berdasarkan jenis kelamin, ras, atau kelas sosial (Russell, 1987).

Teologi feminis memperluas cakupan keadilan sosial dengan menyingkap bahwa ketidakadilan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga tertanam dalam relasi kuasa berbasis gender yang sering kali dilegitimasi secara teologis. Dengan menafsir ulang teks-teks Kitab Suci dan sejarah gereja, para teolog feminis menuntut agar komunitas iman konsisten menerapkan prinsip kesetaraan martabat yang mereka wartakan. Dalam konteks Indonesia, kepekaan ini penting mengingat kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius, sehingga gereja dipanggil bukan hanya mengecam ketidakadilan di luar dirinya, tetapi juga membenahi struktur patriarkal di dalam dirinya sendiri (Fiorenza, 1983; Russell, 1987).

ETIKA SOSIAL DALAM KONTEKS INDONESIA

a. Teologi Kontekstual Indonesia

Teologi kontekstual Indonesia berkembang dari kesadaran bahwa teologi tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan selalu terbentuk dalam konteks sosial budaya tertentu. Para teolog Indonesia seperti Emanuel Gerrit Singgih, Victor Immanuel Tanja, dan Zakaria Ngelow telah berupaya mengembangkan teologi yang berakar dalam budaya dan pergumulan masyarakat Indonesia. Teologi kontekstual Indonesia berupaya membaca Alkitab melalui kacamata pengalaman Indonesia yang khas tentang kemajemukan, ketidakadilan struktural, warisan kolonialisme, dan pergulatan membangun identitas bangsa (Singgih, 2000).

Konsep *"shalom"* (damai sejahtera) menjadi salah satu kata kunci dalam teologi kontekstual Indonesia. Shalom tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi mencakup keadaan di mana setiap orang dapat hidup dengan martabat penuh, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan relasi antarmanusia bersifat harmonis dan adil. Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan kemiskinan, korupsi, dan diskriminasi, visi shalom ini menjadi orientasi profetis bagi gereja (Tanja, 1994).

Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyediakan titik temu antara cita-cita teologis tentang shalom dan cita-cita konstitusional negara. Gereja tidak perlu memaksakan bahasa dogmatismenya di ruang publik, tetapi dapat menerjemahkan komitmen imannya ke dalam bahasa keadilan bersama yang dapat diterima lintas agama (Singgih, 2000). Teologi

kontekstual Indonesia dengan demikian bukan sekadar adaptasi budaya, melainkan upaya menjadikan iman relevan bagi pergumulan bersama seluruh bangsa. Di sinilah kemitraan lintas iman, sebagaimana didorong oleh berbagai lembaga oikumene, menjadi sarana penting untuk melawan kemiskinan, korupsi, dan intoleransi tanpa kehilangan identitas iman masing-masing (Tanja, 1994).

b. Tantangan Khusus Gereja Indonesia

Gereja-gereja di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam konteks kemajemukan. Sebagai minoritas agama dalam negara berpenduduk mayoritas Muslim, gereja dipanggil untuk menemukan cara beriman yang tidak defensif atau tertutup, melainkan terbuka dalam dialog dan kerjasama lintas agama demi kebaikan bersama. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah mengembangkan berbagai inisiatif dalam bidang dialog antaragama, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan publik (Ngelow, 1994).

Dalam konteks ketidakadilan struktural yang masih dialami oleh banyak masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat yang kehilangan lahan, buruh yang upahnya tidak layak, dan kelompok perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, gereja dipanggil untuk mengambil posisi profetis. Stanley Hauerwas mengingatkan bahwa gereja yang terlalu mengakomodasi diri dengan kekuasaan duniawi akan kehilangan karakter khasnya sebagai komunitas yang berbeda (*counter culture*) dan tidak lagi mampu menjadi saksi yang efektif bagi nilai-nilai Kerajaan Allah (Hauerwas, 1981).

Isu rekonsiliasi antarsuku dan antaragama juga menjadi dimensi penting etika sosial gereja Indonesia. Konflik-konflik horizontal yang pernah terjadi di berbagai daerah seperti di Maluku, Poso, dan Kalimantan Tengah, memperlihatkan betapa dalamnya luka sosial yang perlu disembuhkan. Dalam konteks ini, teologi rekonsiliasi Volf menjadi sangat relevan bagi gereja dipanggil untuk menjadi komunitas penyembuhan yang memfasilitasi proses pengakuan, pengampunan, dan pemulihan relasi yang rusak (Volf, 1996).

c. Gereja sebagai Agen Pembangunan Sosial

Selain peran profetis dan rekonsiliatoris, gereja Indonesia juga memiliki potensi besar sebagai agen pembangunan sosial. Melalui jaringan lembaga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang dimiliki berbagai denominasi gereja, gereja dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Walter Wink mengingatkan bahwa transformasi sosial tidak hanya berupa perubahan struktur eksternal, tetapi juga mencakup transformasi batiniah dari mentalitas kekerasan dan ketidakadilan (Wink, 1998).

Lochman (1980) menekankan bahwa rekonsiliasi dan pembebasan bukan dua pilihan yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi dari satu misi yang utuh. Gereja yang hanya menekankan rekonsiliasi tanpa keberanian menyuarakan keadilan akan terperangkap dalam kedamaian palsu. Sebaliknya, gereja yang hanya berfokus pada perjuangan keadilan tanpa spirit rekonsiliasi berisiko menjadi gerakan yang memperparah polarisasi sosial. Keseimbangan antara keduanya merupakan tantangan teologis praktis yang harus terus diperjuangkan oleh gereja Indonesia.

IMPLIKASI PRAKTIS BAGI GEREJA MASA KINI

a. Gereja sebagai Komunitas Profetis

Salah satu implikasi paling mendasar dari etika sosial teologi kontemporer adalah panggilan gereja untuk menjadi komunitas profetis. Mengikuti tradisi nabi-nabi Perjanjian Lama, gereja dipanggil untuk berani menyuarakan kebenaran kepada kekuasaan (*speaking truth to power*), mengkritisi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat banyak, dan membela hak-hak mereka yang tidak memiliki suara (Brueggemann, 2001).

Namun, sikap profetis ini harus dilandasi oleh keterlibatan langsung dengan realitas kaum marginal, bukan hanya pernyataan retorik dari tempat yang aman. Gutierrez

menekankan bahwa preferential option for the poor harus bersifat nyata, bukan sekadar wacana teologis. Artinya, gereja harus hadir secara fisik di tengah komunitas yang miskin dan tertindas, mendengarkan pergumulan mereka, dan berjuang bersama mereka untuk perubahan struktural (Gutiérrez, 1973).

Panggilan profetis ini perlu diimbangi dengan pelayanan kasih yang nyata (diakonia). Gereja bukan hanya bersuara, tetapi juga hadir melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan. Diakonia yang transformatif tidak berhenti pada bantuan karitatif yang meredakan gejala kemiskinan, melainkan berupaya menyentuh akar-akar strukturalnya, sehingga masyarakat yang dilayani beranjak dari objek bantuan menjadi subjek yang berdaya. Wink menegaskan bahwa transformasi sosial menuntut perubahan tidak hanya pada struktur lahiriah, tetapi juga pada spiritualitas atau roh yang menggerakkan sistem-sistem tersebut, sehingga perlawanan terhadap ketidakadilan mesti bersifat menyeluruh dan tanpa kekerasan (Wink, 1998).

b. Pendidikan Kritis dan Transformatif

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen (PAK), etika sosial yang berbasis teologi kontemporer menuntut pergeseran dari pendidikan yang hanya berfokus pada transmisi doktrin menuju pendidikan yang bersifat kritis transformatif. Groome (1991) mengembangkan pendekatan “shared praxis” dalam PAK, di mana peserta didik diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka dalam terang iman, menganalisis realitas sosial secara kritis, dan merumuskan komitmen tindakan yang transformatif. Pendidikan semacam ini membentuk generasi Kristen yang tidak hanya saleh secara personal tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.

Kurikulum PAK yang berorientasi keadilan sosial seharusnya mencakup :

- Pemahaman tentang hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai Imago Dei.
- Menganalisis kritis terhadap kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural.
- Mengeksplorasi kisah-kisah Alkitabiah dari perspektif orang yang tertindas.
- Pembentukan karakter yang peduli, berani, dan berkomitmen pada keadilan.
- Serta keterampilan advokasi dan keterlibatan sosial (Groome, 1991).

c. Liturgi dan Spiritualitas yang Berorientasi Keadilan

Etika sosial yang benar tidak hanya lahir dari analisis intelektual, tetapi juga dari spiritualitas yang dalam. Walter Brueggemann berargumen bahwa liturgi Kristen termasuk nyanyian, doa, proklamasi Firman, dan Perjamuan Kudus mengandung potensi subversif terhadap tatanan sosial yang tidak adil. Ketika gereja merayakan Perjamuan Kudus bersama-sama tanpa memandang status sosial, ras, atau gender, gereja memperagakan secara simbolis visi masyarakat yang egaliter (sederajat) yang dituju oleh Kerajaan Allah (Brueggemann, 2001).

Spiritualitas yang berorientasi keadilan juga berarti bahwa doa dan meditasi tidak hanya berfokus pada berkat pribadi, tetapi mencakup keprihatinan terhadap dunia. Doa syafaat yang sejati adalah doa yang membawa realitas penderitaan dunia ke hadapan Allah, sekaligus memupuk kepekaan dan keterlibatan nyata dalam merespons penderitaan tersebut. Gereja-gereja yang mengintegrasikan dimensi keadilan sosial ke dalam kehidupan liturgis mereka akan melahirkan jemaat yang lebih peka dan responsif terhadap persoalan sosial (Migliore, 2004).

d. Teologi Pembebasan dan Dosa Struktural: Perspektif Gustavo Gutiérrez menurut Mateus Mali

Dalam konteks teologi kontemporer, keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan kepada kaum tertindas. Mateus Mali, dalam kajiannya atas teologi pembebasan Gustavo Gutiérrez, menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat bukanlah kecelakaan atau nasib, melainkan produk dari struktur. Bagi Gutiérrez

sebagaimana dibaca Mali, orang “dibuat miskin”: kemiskinan bersifat struktural karena ditopang oleh sistem ekonomi-politik yang menguntungkan segelintir elite penguasa dan pemodal, sementara mayoritas rakyat dihisap dan dipinggirkan. Inilah yang disebut dosa struktur, yakni dosa yang tidak lagi berhenti pada tindakan personal, tetapi mengeras menjadi sistem yang melanggengkan ketidakadilan (Mali, 2016).

Mali menunjukkan bahwa kritik Gutiérrez tertuju pada kapitalisme dan kepemilikan privat yang terus-menerus mengalirkan keuntungan kepada kelompok kecil dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, keadilan tidak cukup diwujudkan lewat amal (*charity*) atau kebaikan individual; yang dituntut adalah transformasi struktural yang mengembalikan hak kaum miskin. Teologi, dalam kerangka ini, tidak boleh menjadi perangkat kebenaran abstrak yang steril, melainkan refleksi atas pengalaman iman komunitas yang lahir dari perjumpaan nyata dengan penderitaan orang miskin (Mali, 2016).

Implikasinya jelas: gereja dipanggil untuk membuat pilihan preferensial bagi orang miskin (*preferential option for the poor*) dan menjadi gereja kaum miskin. Bagi konteks Indonesia, seruan ini relevan karena teologi yang otentik menuntut keterlibatan langsung dalam praksis sosial, yakni mendampingi buruh, petani, dan masyarakat adat yang hak ekonomi maupun ekologisnya terampas. Keadilan sejati baru terwujud ketika struktur yang menindas dibongkar dan digantikan oleh sistem yang lebih adil dan manusiawi.

e. Etika Kristen di Ruang Publik: Keterbukaan, Kejujuran, dan Keberanian menurut Hendra Winarjo

Tantangan lain dalam teologi kontemporer adalah bagaimana etika sosial dijalankan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, khususnya ketika umat Kristen memasuki ruang publik. Hendra Winarjo menawarkan gagasan etika kebajikan Kristen (*Christian virtue ethics*) yang bertumpu pada tiga laku: keterbukaan, kejujuran, dan keberanian. Ketiganya, menurut Winarjo, saling berkelindan dan memungkinkan kekristenan menjadi kontra-budaya di satu sisi, sekaligus menghadirkan keadilan di sisi lain (Winarjo, 2022).

Yang khas dari argumen Winarjo adalah penolakannya terhadap dua sikap ekstrem sekaligus. Di satu kutub terdapat sikap fundamentalistik yang menutup diri dan memaksakan kebenaran sepihak; di kutub lain terdapat sikap kompromistik yang melarutkan identitas iman demi diterima. Keterbukaan menuntut kesediaan mendengar dan berdialog lintas keyakinan; kejujuran menjaga integritas kesaksian; dan keberanian memungkinkan umat menyuarakan kebenaran serta keadilan meski berisiko. Dengan tiga kebajikan ini, kehadiran Kristen di ruang publik tidak berkesan menghakimi, tetapi juga tidak kehilangan pijakannya (Winarjo, 2022).

Bagi konteks Indonesia yang plural, pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan teologis diukur dari sejauh mana komunitas iman mampu terlibat secara etis di ruang bersama demi kebaikan bersama (*bonum commune*), tanpa terjebak dalam eksklusivisme. Etika ruang publik semacam ini menjadi jembatan dialogis untuk memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan bersama warga lain.

f. Teologi Disabilitas: Membongkar Normalisme menurut Isabella Novsima Sinulingga

Keadilan sosial dalam teologi kontemporer juga memperluas cakupannya kepada kelompok yang selama ini terabaikan dalam narasi teologi tradisional, salah satunya penyandang disabilitas. Isabella Novsima Sinulingga, melalui konstruksi teologi disabilitas intelektual, menantang cara pandang yang menilai disabilitas dari kacamata normalitas. Ia menyebutnya *normalisme*, yaitu kerangka yang mereduksi pribadi dengan disabilitas menjadi sekadar organisme yang “rusak” dan dianggap tidak berfungsi di masyarakat (Sinulingga, 2015).

Sinulingga membongkar normalisme itu dengan sumber daya teologis yang kaya. Melalui konsep keindahan dalam seluruh ciptaan, relasi kasih dalam Trinitas yang digambarkan sebagai perichoresis, serta gagasan imago Dei dan imago Christi, ia menegaskan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh kesempurnaan fisik atau intelektual, melainkan oleh statusnya sebagai gambar Allah. Dengan demikian, penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan (charity model) yang harus dikasihani, melainkan subjek penuh (rights-based model) yang memiliki tempat setara di dalam tubuh Kristus (Sinulingga, 2015).

Implikasi keadilannya konkret. Gereja dan masyarakat dituntut bertobat dari cara pandang yang mengeksklusi, dan bergerak menuju komunitas yang ramah, aksesibel, dan inklusif, baik dalam fasilitas fisik maupun keterlibatan dalam kepemimpinan dan pelayanan. Teologi disabilitas ini memperluas makna keadilan: dari sekadar redistribusi ekonomi menjadi pengakuan eksistensial dan penghormatan atas keberagaman ciptaan Allah.

g. Fungsi Profetis Gereja: Menolak Kebungkaman terhadap Isu Sosial menurut Cory Febrica Bella

Praksis dari etika sosial kontemporer pada akhirnya bermuara pada tanggung jawab profetis gereja. Cory Febrica Bella, dengan membaca kritik Walter Rauschenbusch, menyoroti bahaya kebungkaman gereja di hadapan krisis sosial. Sebagaimana Rauschenbusch mengecam diamnya gereja terhadap ketidakadilan pada masyarakat Amerika abad ke-19, Bella menilai gereja masa kini pun kerap absen dalam advokasi bagi kaum yang termarginalkan (Bella, 2022).

Bagi Bella, kunci perubahan terletak pada kepemimpinan gereja. Pemimpin gereja adalah penggerak utama gerakan dan aksi sosial jemaat; karena itu ketika pemimpin gereja bungkam, seluruh komunitas kehilangan suara profetisnya. Ia menyerukan agar gereja menempatkan pengajaran etis-sosial dan pilihan berpihak kepada kaum marginal (preferential option for the marginalized) sebagai inti pelayanan, bukan pelengkap. Pemimpin gereja yang bersuara sekaligus beraksi menjadi teladan yang menyiapkan jemaat memahami nilai moral dan etika sesuai teladan Yesus (Bella, 2022).

Seruan ini menuntut lebih dari retorika. Suara profetis baru memiliki legitimasi moral bila gereja berani menegaskan kebenaran di hadapan kekuasaan sekaligus jujur mengoreksi dirinya sendiri. Keadilan dalam teologi kontemporer, dengan demikian, bukan janji eskatologis yang jauh, melainkan tanggung jawab historis yang harus diperjuangkan gereja di sini dan kini melalui keteladanan dan keterlibatan nyata.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, integrasi pemikiran dari keempat penulis Indonesia ini menunjukkan bahwa etika sosial dan keadilan dalam teologi kontemporer adalah panggilan untuk bertindak yang nyata. Baik melalui lensa pembebasan kaum miskin dan kritik atas dosa struktural (Mali, 2016), etika kebajikan Kristen di ruang publik (Winarjo, 2022), pemenuhan hak dan martabat penyandang disabilitas (Sinulingga, 2015), maupun fungsi profetis gereja dalam menyuarakan isu sosial (Bella, 2022), teologi kontemporer menegaskan hal yang sama: iman yang sejati tidak boleh abai terhadap penderitaan duniawi, melainkan harus mewujudkan dalam perjuangan gigih menegaskan keadilan sosial demi kemanusiaan yang bermartabat.

Kajian terhadap etika sosial dan keadilan dalam teologi kontemporer menunjukkan bahwa tradisi teologi Kristen memiliki sumber daya yang kaya untuk merespons tantangan ketidakadilan sosial di dunia masa kini. Dari teologi pembebasan Amerika Latin hingga teologi harapan Eropa, dari teologi feminis hingga teologi kontekstual Asia, satu benang

merah tampak jelas bahwa iman kepada Allah yang adil dan pengasih tidak dapat dipisahkan dari komitmen terhadap keadilan sosial dalam kehidupan nyata.

Para teolog kontemporer telah memperkaya pemahaman tentang keadilan melebihi sekadar distribusi sumber daya secara merata. Keadilan dalam perspektif teologi Kristen adalah tentang pemulihan relasi yang rusak akibat dosa, relasi manusia dengan Allah, relasi antarmanusia, dan relasi manusia dengan alam. Inilah keadilan restoratif yang berakar dalam Shalom Allah, yang mendorong transformasi tidak hanya pada level individual tetapi juga struktural.

Dalam konteks Indonesia, gereja-gereja dipanggil untuk merespons panggilan ini secara konkret dengan hadir di tengah komunitas yang marginal, membangun kemitraan lintas agama demi kebaikan bersama, mengembangkan pendidikan yang kritis-transformatif, dan menjadi suara profetis di tengah masyarakat. Hal ini bukanlah pilihan tambahan, melainkan inti dari misi gereja sebagai tubuh Kristus yang terus hadir dan bekerja di dunia.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa kekayaan tradisi teologi global hanya menjadi bermakna ketika dibaca ulang dari dalam konteks Indonesia sendiri. Suara Gutiérrez tentang kaum miskin, Moltmann tentang harapan, Volf tentang rekonsiliasi, dan Wolterstorff tentang hak berjumpa dengan pergumulan nyata bangsa ini mengenai kemiskinan, konflik horizontal, marginalisasi kelompok rentan, dan keadilan ruang publik. Justru dalam perjumpaan itulah etika sosial teologis menemukan relevansinya, bukan sebagai teori yang diimpor, melainkan sebagai iman yang berakar, kritis, dan berpihak.

Akhirnya, etika sosial yang bermutu dalam teologi kontemporer tidak lahir dari semangat ideologis belaka, tetapi dari pengalaman perjumpaan yang nyata dengan Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, tinggal di antara orang miskin, mati karena memperjuangkan kebenaran, dan bangkit sebagai janji akan dunia yang telah diperbarui. Persekutuan dengan Kristus yang tersalib dan bangkit inilah yang menjadi sumber daya tak habis-habisnya bagi keterlibatan gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, J. S., & Steenbrink, K. (Eds.). (2008). *A history of Christianity in Indonesia*. Brill.
- Bella, C. F. (2022). Gereja terpanggil menyuarakan isu sosial melalui pemimpin gereja: Analisis Walter Rauschenbusch terhadap jabatan kepemimpinan di gereja. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 3(2), 140–152. <https://doi.org/10.47530/edulead.v3i2.110>
- Bevans, S. B., & Schroeder, R. P. (2011). *Prophetic dialogue: Reflections on Christian mission today*. Orbis Books.
- Boff, L., & Boff, C. (2007). *Introducing liberation theology* (P. Burns, Trans.). Orbis Books. (Karya asli terbit 1986)
- Brueggemann, W. (2001). *The prophetic imagination* (2nd ed.). Fortress Press.
- de Gruchy, J. W. (1995). *Christianity and democracy: A theology for a just world order*. Cambridge University Press.
- Fiorenza, E. S. (1983). *In memory of her: A feminist theological reconstruction of Christian origins*. Crossroad.
- Groome, T. H. (1991). *Sharing faith: A comprehensive approach to religious education and pastoral ministry*. HarperSanFrancisco.
- Gutiérrez, G. (1973). *A theology of liberation: History, politics, and salvation* (C. Inda & J. Eagleson, Trans.). Orbis Books.
- Hauerwas, S. (1981). *A community of character: Toward a constructive Christian social ethic*. University of Notre Dame Press.
- Hauerwas, S., & Wells, S. (Eds.). (2011). *The Blackwell companion to Christian ethics* (2nd ed.).

- Wiley-Blackwell.
- Keum, J. (Ed.). (2013). *Together towards life: Mission and evangelism in changing landscapes*. WCC Publications.
- Lochman, J. M. (1980). *Reconciliation and liberation: Challenging a one-sided theology*. Fortress Press.
- Mali, M. (2016). Gutiérrez dan teologi pembebasan. *Orientasi Baru*, 25. Universitas Sanata Dharma.
- Migliore, D. L. (2004). *Faith seeking understanding: An introduction to Christian theology* (2nd ed.). Eerdmans.
- Moltmann, J. (1967). *Theology of hope: On the ground and the implications of a Christian eschatology* (J. W. Leitch, Trans.). Harper & Row.
- Moltmann, J. (1974). *The crucified God: The cross of Christ as the foundation and criticism of Christian theology* (R. A. Wilson & J. Bowden, Trans.). Harper & Row.
- Moltmann, J. (1992). *The Spirit of life: A universal affirmation* (M. Kohl, Trans.). Fortress Press.
- Moltmann, J. (2000). *Experiences in theology: Ways and forms of Christian theology* (M. Kohl, Trans.). Fortress Press.
- Ngelow, Z. J. (1994). *Kekristenan dan nasionalisme: Perjumpaan umat Kristen Protestan dengan pergerakan nasional Indonesia, 1900–1950*. BPK Gunung Mulia.
- Niebuhr, R. (1932). *Moral man and immoral society: A study in ethics and politics*. Charles Scribner's Sons.
- Russell, L. M. (1987). *Household of freedom: Authority in feminist theology*. Westminster Press.
- Singgih, E. G. (2000). *Berteologi dalam konteks: Pemikiran-pemikiran mengenai kontekstualisasi teologi di Indonesia*. Kanisius.
- Sinulingga, I. N. (2015). Keindahan dalam disabilitas: Sebuah konstruksi teologi disabilitas intelektual. *Indonesian Journal of Theology*, 3(1), 35–60. <https://doi.org/10.46567/ijt.v3i1.64>
- Sobrinho, J. (2008). *No salvation outside the poor: Prophetic-utopian essays*. Orbis Books.
- Tanja, V. I. (1994). *Spiritualitas, pluralitas dan pembangunan di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Verhey, A. (1984). *The great reversal: Ethics and the New Testament*. Eerdmans.
- Volf, M. (1996). *Exclusion and embrace: A theological exploration of identity, otherness, and reconciliation*. Abingdon Press.
- Winarjo, H. (2022). Etika kebajikan Kristen di ruang publik: Keterbukaan, kejujuran, dan keberanian. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 6(2), 163–178.
- Wink, W. (1998). *The powers that be: Theology for a new millennium*. Doubleday.
- Wolterstorff, N. (2008). *Justice: Rights and wrongs*. Princeton University Press.